p-ISSN 2302-5476
e-ISSN 2579-3934

JURNAL TEOLOGI, 15.02 (2026): 155 - 186

Dari Ketimpangan Sosial Menuju Komunitas Kontras: Ajaran Sosial Gereja dan Refleksi Pastoral Kardinal Ignatius Suharyo bagi Jakarta

Antonius Eddy Kristiyanto[a]; Albertus Pantra[a]; Kasimirus Lambok Hartanto[a]; Marcelino[a,1]

[a] *Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta-Indonesia*
[1] Email korespondensi: *marcelinovalerian22@gmail.com*

DOI: 10.24071/jt.v15i02.1252

Submitted: 02-06-2026 | Accepted: 29-10-2026 | Published: 30-10-2026

Abstrak

Ketimpangan sosial di Jakarta bukan sekadar tantangan ekonomi, melainkan juga persoalan teologis dan moral yang menuntut tanggapan iman yang nyata. Artikel ini membahas bagaimana ketimpangan sosial di Jakarta dipahami berdasarkan pandangan Ajaran Sosial Gereja (ASG) dan refleksi pastoral Kardinal Ignatius Suharyo sebagai Uskup Agung Jakarta. Dengan menganalisis dokumen Gereja dan teks-teks pastoral, serta wawancara dengan tokoh pastoral dalam lingkup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), artikel ini mengeksplorasi tiga hal yang saling terkait, yakni realitas ketimpangan sosial di Jakarta, pandangan ASG atas fenomena tersebut, dan refleksi pastoral Kardinal Suharyo dalam menanggapinya. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di Jakarta tampak dari kontras mencolok antara kawasan elit dan permukiman kumuh, peningkatan angka kriminalitas, dan memburuknya indeks kedalaman kemiskinan, dengan rasio gini sebesar 0,441 pada Maret 2025 (data dibatasi pada September 2024-September 2025). Dengan keadaan ini, martabat manusia *(imago Dei)*, kebaikan bersama *(bonum commune)*, dan solidaritas, menjadi tiga prinsip fundamental ASG telah dilanggar secara sistematis. Refleksi pastoral Kardinal Suharyo mengutamakan empat hal, yakni belarasa, martabat manusia, kesejahteraan bersama, dan berbagi. Keempat pokok yang diinspirasikan oleh Kitab Suci dan ASG tersebut kemudian diwujudkan secara konkret melalui program-program, seperti ASAK, Ayo Kerja, SABUK, dan koperasi simpan pinjam. Kardinal Suharyo merefleksikan bahwa Gereja perlu menjadi komunitas kontras yang menanggapi ketimpangan sosial melalui solidaritas aktif, advokasi profetis, dan pengembangan manusia yang integral.

Kata Kunci:

Ajaran Sosial Gereja, Belarasa, Bonum Commune, Komunitas Kontras, Imago Dei.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

From Social Inequality to a Contrast Community: Catholic Social Teaching and Cardinal Ignatius Suharyo's Pastoral Reflections for Jakarta

Abstract

Social inequality in Jakarta represents not merely an economic problem but a theological and moral challenge demanding a concrete faith-based response. This article investigates how social inequality in Jakarta can be understood through the Catholic Social Teaching (CST) and the pastoral reflections of Cardinal Ignatius Suharyo, Archbishop of Jakarta. By analyzing Church documents and pastoral texts and conducting an interview with a key pastoral figure within the Archdiocese of Jakarta, this study explores three interconnected dimensions, namely the reality of social inequality in Jakarta, the CST's reading of this phenomenon, and Cardinal Suharyo's pastoral reflections in responding to it. The findings indicate that social inequality in Jakarta is starkly visible in the sharp contrast between elite districts and urban slums, rising crime rates, and worsening poverty depth indices, with a Gini ratio of 0,441 in March 2025 (the data are limited to the period from September 2024 to September 2025). Under these conditions, human dignity (imago Dei), the common good (bonum commune), and solidarity, the three fundamental principles of CST, have been systematically violated. Cardinal Suharyo's pastoral reflections prioritize four key themes, namely compassionate solidarity, human dignity, common welfare, and sharing, all of which are grounded in Sacred Scripture and CST. And then manifested in concretely embodied through programs such as ASAK, Ayo Kerja, SABUK, and a credit union. Cardinal Suharyo reflects that the Church must become a contrast community that responds to social inequality through active solidarity, prophetic advocacy, and integral human development.

Keywords:

Catholic Social Teaching, Compassionate Solidarity, Bonum Commune, Contrast Community, Imago Dei.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial bukan hanya sebuah fenomena yang terjadi di dalam suatu negara, melainkan menjadi masalah global yang turut

dirasakan oleh masyarakat dunia.[1] Seluruh masyarakat dunia turut merasakan dampak ketimpangan sosial dan memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya. Bagi sebagian kecil orang yang menguasai sebagian besar kekayaan dunia, kesenjangan sosial sering kali tidak dirasakan sebagai masalah mendesak. Mereka merasa menjadi "pemenang atas kehidupan". Namun, bagi sebagian besar orang yang menikmati sebagian kecil kekayaan dunia, fenomena ini menjadi permasalahan yang menakutkan.[2] Oleh sebab itu, masyarakat sedunia perlu memiliki solidaritas global supaya permasalahan ini tidak semakin serius, melainkan secara perlahan namun pasti dapat bergerak menuju situasi yang lebih baik.

Bila ketimpangan sosial dibiarkan terus-menerus, berbagai permasalahan sosial dapat muncul, termasuk tindakan kejahatan dengan kekerasan.[3] Ketika masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hidup melihat bahwa terdapat segelintir orang yang sedang menikmati kemewahan, hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Pihak kelas menengah ke bawah merasa bahwa pihak yang lebih kaya darinya tidak memiliki kepekaan sosial terhadap penderitaan mereka. Sebaliknya, kelompok orang yang hidup lebih mapan merasa bahwa kekayaannya merupakan hak yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Situasi ini dapat memicu berbagai tindakan kejahatan demi tujuan yang ingin dicapai.

Maka dari itu, penumpukan kekayaan di sekelompok kecil orang di tengah kemiskinan banyak orang dapat menjadi salah satu penyebab perpecahan dalam masyarakat.[4] Pemerintah perlu mencari langkah-langkah yang efektif dan kreatif supaya permasalahan ini dapat menemukan jalan keluarnya. Seraya pemerintah mencari solusinya, setiap pribadi juga diharapkan memiliki kesadaran bahwa hidup sebagai warga negara dan warga dunia bukanlah hidup seorang diri. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain sekaligus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesamanya.

---

1 Branko Milanovic, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 2.

2 Peter Lawrence, "The Global and National Inequality Faultlines: The Economic Dimensions of (In)Security," *Journal of Global Faultlines* 8, no. 1 (2021): 31, https://doi.org/10.13169/jglobfaul.8.1.0023.

3 Lawrence, "The Global and National Inequality Faultlines," 31.

4 Lawrence, "The Global and National Inequality Faultlines," 31.

Tanggung jawab ini juga berlaku di tingkat nasional. Dalam konteks Indonesia, upaya mengatasi ketimpangan tidak lepas dari pertanyaan tentang sistem dan kebijakan yang lebih besar, termasuk soal di mana pusat kekuasaan dan ekonomi negara ini berkedudukan. Hingga naskah ini ditulis, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Jakarta juga telah menjadi tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Menurut data yang diambil dari laman daring Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kota ini mengalami kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2025 tingkat kemiskinan di Jakarta mencapai 4,28%. Angka ini naik dari 4,14% pada September 2024. Data ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi COVID-19.[5] Angka ini kemudian turun menjadi 4.03% pada September 2025 (lihat bagian 3.5). Walaupun dikatakan bahwa pada awal tahun 2026 angka rasio gini (indikator statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk) menurun dari 0,441 ke 0,423, menurut Gubernur Pramono, tetap saja tidak mudah untuk menurunkan ketimpangan sosial di wilayah Jakarta. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor yang kompleks.[6] Kerumitan ini tidak lepas dari skala sosial Jakarta itu sendiri.

Menurut BPS, per 20 Februari 2026, terdapat sekitar 10 juta penduduk yang tinggal di wilayah Jakarta. Status Jakarta sebagai ibu kota megapolitan tidak bisa lepas dari keberadaan orang-orang miskin yang mencari peruntungan di ibu kota.[7] Para pendatang yang tidak memiliki keterampilan unggul cenderung masuk ke dalam lingkungan pekerjaan yang tidak menentu, penghasilan rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak.[8] Beberapa upaya terus dilakukan oleh Gubernur dan jajarannya

5 "Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Pemprov DKI Siapkan Tujuh Kebijakan", Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terakhir dimodifikasi 28 Juli 2025, https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/5762-SP-HMS-07-2025.

6 Editor, "Pramono Sebut Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Menurun pada Kuartal I-2026," *Regional Kontan.co.id*, 17 April 2026, https://regional.kontan.co.id/news/pramono-sebut-tingkat-ketimpangan-ekonomi-di-jakarta-menurun-pada-kuartal-i-2026.

7 "Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025) Provinsi DKI Jakarta," Badan Pusat Statistik, terakhir dimodifikasi 5 Mei 2026, https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/1339/hasil-survei-penduduk-antar-sensus--supas-2025--provinsi--dki-jakarta.html.

8 Fairuz Muhammad Sabiq Fachri, dkk, "Analisis Pengaruh Migrasi terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Jakarta," *Journal Social Society* 5, no 2 (2025): 897, https://doi.org/10.30605/jss.5.2.2025.793.

untuk mengurangi jumlah orang miskin di wilayah ini. Pemerintah berusaha untuk tetap menyalurkan bantuan supaya dapat meringankan beban warga. Pemerintah terus berusaha agar warga miskin dapat memiliki kualitas hidup yang layak demi masa depan yang lebih baik.

Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup untuk menjawab permasalahan kesenjangan sosial di Jakarta secara mendalam. Gereja juga dipanggil untuk ambil bagian dalam permasalahan ini sebagai komunitas yang digerakkan oleh iman. Dalam tradisi Gereja, realitas sosial dibaca sebagai "tanda-tanda zaman," sebagaimana ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*.[9] Refleksi teologi sosial bukan sekadar diskusi abstrak, melainkan pembacaan mendalam tentang kondisi konkret masyarakat melalui sudut pandang iman Kristiani. Refleksi teologis bukan hanya untuk memahami masalah sosial, tetapi juga untuk mengubahnya menjadi lebih baik. John Haughey, dalam buku *The Faith That Does Justice*, menekankan bahwa umat Kristiani tidak akan berubah sikap tentang keadilan sampai mereka benar-benar melihat Yesus mewujudkan cita-cita keadilan yang Gereja ajarkan.[10] Ini berarti bahwa refleksi teologi sosial harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang apa yang Yesus lakukan dan bagaimana Dia berkomitmen terhadap keadilan bagi semua orang.

Lebih penting lagi, refleksi teologi sosial menghubungkan iman dengan tindakan konkret. Solidaritas Kristiani bukan sekadar belas kasih, tetapi komitmen aktif untuk membela orang-orang yang tersingkir dan tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil.[11] Refleksi ini mengundang umat beriman untuk melihat kaum miskin bukan sebagai objek pemberian amal, melainkan sebagai saudara seiman yang memiliki martabat penuh. Refleksi teologi sosial memungkinkan umat beriman untuk membaca penderitaan masyarakat sebagai panggilan Tuhan kepada Gereja untuk bertindak.[12] Gereja harus mengintegrasikan perhatian vertikal kepada Tuhan dengan perhatian horizontal kepada sesama dalam menghadapi ketimpangan sosial.

Pemahaman ini sangat penting dalam konteks ketimpangan sosial di Jakarta. Ketimpangan sosial bukan sekadar persoalan statistik ekonomi

---

9 *Gaudium et Spes* (7 Desember 1965), art. 4. Dokumen ini selanjutnya disingkat *GS*.

10 John C. Haughey, "Jesus as the Justice of God," dalam *The Faith That Does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change*, diedit oleh John C. Haughey (New York: Paulist Press, 1977), 274.

11 Clodovis Boff dan Jorge Pixley, *The Bible, The Church, and The Poor* (Michigan: Orbis Books, 1989), 151-152.

12 Haughey, "Jesus as the Justice of God," 275.

yang dapat diselesaikan dengan kebijakan teknis semata. Lebih dari itu, fenomena ini memiliki dimensi teologis dan moral yang memerlukan refleksi mendalam dari perspektif iman Kristiani. Ketika sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya sementara yang lain hidup dalam kemiskinan, ini mencerminkan pelanggaran terhadap martabat manusia yang bersumber pada penciptaan mereka sebagai citra Allah (Kej. 1:27).

Berdasarkan pemahaman akan pentingnya refleksi teologi sosial dalam membaca realitas masyarakat, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana ketimpangan sosial di Jakarta dapat dipahami? Kedua, bagaimana Ajaran Sosial Gereja (ASG) membaca fenomena ini? Ketiga, bagaimana refleksi pastoral Kardinal Suharyo membantu membaca realitas tersebut? Ketiga pertanyaan ini mengikuti pola melihat-menilai-bertindak *(see-judge-act)*: realitas ketimpangan sosial di Jakarta dilihat, dinilai dalam perspektif ASG, hingga dijabarkan menjadi tindakan pastoral melalui refleksi Kardinal Suharyo.[13]

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa teologi sosial Gereja memberikan kerangka komprehensif dan integral dalam memahami ketimpangan sosial Jakarta. Ketimpangan sosial bukan hanya sebagai masalah ekonomi tetapi sebagai tantangan pastoral dan moral. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana refleksi pastoral Kardinal Suharyo mengaktualisasikan Ajaran Sosial Gereja yang universal ke dalam konteks lokal Jakarta, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan relevan bagi kehidupan umat. Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada penghubungan antara analisis ketimpangan sosial dengan refleksi pastoral seorang pemimpin Gereja lokal. Dengan demikian, ajaran

[13] Pemikiran Boff, yang dirujuk dalam artikel ini, mengenai martabat manusia dan keadilan bagi kaum miskin dapat dibaca sejalan dengan tradisi filsafat Aristotelian-Tomistik. Tradisi ini menempatkan martabat manusia dan kebaikan bersama sebagai pusat dari kehidupan sosial. Tradisi ini kemudian dikembangkan oleh pemikir neotomisme bernama Bernard Lonergan dengan pola: mengalami, memahami, menilai, dan memutuskan (Bernard Lonergan, *Method in Theology* (Toronto: University of Toronto Press, 2007), 14-15). Pola ini selaras dengan metode ASG, khususnya dokumen *Mater et Magistra* yang menggunakan pola: melihat, menilai, dan bertindak (Yohanes XXIII, *Mater et Magistra* (selanjutnya disingkat *MM*) (15 Mei 1961), art. 236 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999)). Tradisi ini juga disebut dan dilanjutkan oleh Paus Leo XIV pada ensiklik pertamanya yang berjudul *Magnifica Humanitas* (Leo XIV, "Magnifica Humanitas," art. 3, *The Holy See*, 15 Mei 2026, https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html). Dengan menghubungkan akar filosofis ini dengan ensiklik terbaru, kajian ini memiliki horizon yang lebih luas dan dapat dilanjutkan pada persoalan yang baru.

teologi yang universal diterjemahkan menjadi praksis pastoral yang konkret dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas ketimpangan sosial yang ada di Jakarta dalam perspektif ASG dan refleksi pastoral Kardinal Suharyo. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.[14] Dalam hal ini, kata-kata tertulis adalah hasil dari penelitian ini. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara seorang tokoh pastoral yang ada di KAJ. Kedua sumber tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis keterkaitan antara realitas ketimpangan sosial, prinsip-prinsip ASG, dan tanggapan pastoral pemimpin Gereja terkait masalah ini.

Data tertulis dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen ASG, surat-surat gembala Kardinal Suharyo, literatur ilmiah, dan data statistik yang dibutuhkan. Data statistik yang dipakai dibatasi pada publikasi BPS untuk periode September 2024 hingga September 2025, sedangkan pernyataan resmi pemerintah dan Gereja yang digunakan sebagai sumber pendukung dibatasi hingga April 2026. Data di luar rentang ini digunakan sebagai gambaran pendukung karena data terbaru belum tersedia. Seluruh dokumen dan sumber tersebut dipelajari untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip teologis yang relevan, seperti martabat manusia, kebaikan bersama, dan solidaritas, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam refleksi pastoral Kardinal Suharyo.

Selain studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan Pastor Adrianus Suyadi, SJ. Beliau melayani Gereja KAJ sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dan Direktur Lembaga Daya Dharma (LDD). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2026 di kantor LDD KAJ. Narasumber dipilih secara purposif karena Pastor Suyadi adalah ketua komisi yang menaungi program ASAK, SABUK, dan *credit union*. Wawancara tidak membahas refleksi Kardinal Suharyo secara langsung, tetapi memberi informasi

[14] Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: Wiley, 1975), 5 (dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 4).

mengenai pelaksanaan dan tantangan program-program tersebut di paroki-paroki yang ada di KAJ.

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan hubungan antara realitas ketimpangan sosial di Jakarta, prinsip-prinsip ASG, dan refleksi pastoral Kardinal Suharyo. Dokumen Gereja digunakan sebagai landasan teologis, sedangkan wawancara digunakan untuk melihat bagaimana KAJ berperan secara konkret dalam meringankan masalah ketimpangan sosial ini. Hasil analisis tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan pembacaan teologis-pastoral mengenai ketimpangan sosial yang ada di Jakarta.

KETIMPANGAN SOSIAL DI JAKARTA

Jakarta adalah kota yang menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia adalah pusat perekonomian dengan laju pertumbuhan penduduk yang kian melaju. Namun, di sisi lain, ia juga mengandung ketimpangan sosial yang begitu mendalam dan meluas. Memahami ketimpangan sosial di Jakarta tidak cukup hanya dengan membaca statistik yang diterbitkan oleh lembaga tertentu, melainkan perlu memperhatikan bagaimana warganya hidup dengan keadaan tersebut setiap harinya. Bagian ini menguraikan realitas ketimpangan sosial yang ada di Jakarta dengan lima bagian. Pertama, Jakarta dibahas sebagai pusat ekonomi nasional yang justru melahirkan ketimpangan sosial. Kedua, melalui kajian statistik, kesenjangan pendapatan memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Ketiga, realitas nyata antara kawasan elit dan permukiman kumuh menjadi tanda ketidakadilan yang terjadi di dalam kota. Keempat, dampak sosial yang muncul dari ketimpangan sosial, seperti kriminalitas dan pemisahan kelompok dalam masyarakat, dipahami sebagai konsekuensi dari fenomena ini. Kelima, urgensi penanganan permasalahan ketimpangan sosial di Jakarta dipastikan sebagai krisis kemanusiaan yang memerlukan tanggapan yang serius dan menyeluruh.

Jakarta sebagai Pusat Ekonomi

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki peran yang besar dalam menggerakkan perekonomian negara. Jakarta sendiri menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional dengan menyumbang sekitar 16,71% (sekitar 3,7 triliun rupiah). Selain itu,

perputaran uang di Jakarta hampir mencapai 70% dari total perputaran uang di Indonesia. Berdasarkan angka-angka ini, dapat dikatakan bahwa Jakarta adalah pusat perekonomian Indonesia sekaligus berperan penting dalam mendorong perekonomian negara. Terkait investasi, Jakarta tercatat sebagai pemegang rekor tertinggi nasional dengan besaran investasi Rp71,35 triliun pada triwulan ketiga tahun 2024. Angka ini setara dengan kota-kota besar di kawasan Asia Tenggara.[15] Namun, dari angka-angka tersebut perlu dikritisi, sejauh apa dampaknya bagi warga Jakarta. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat ini ternyata tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hanya segelintir pihak saja yang menikmati kesejahteraan di wilayah ibu kota, sedangkan sebagian pihak lainnya hidup dengan penuh penderitaan. Ketimpangan ini membuat siklus kemiskinan menjadi sulit untuk diatasi, sehingga masyarakat miskin tetap terjebak di dalamnya dan tidak dapat menikmati akses-akses yang tersedia secara layak.[16] Dengan demikian, ketimpangan sosial sesungguhnya merupakan fenomena ketidakadilan yang memprihatinkan.

Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan yang terjadi di wilayah Jakarta nampak dalam data-data statistik yang ada. BPS mencatat, hingga September 2024, rasio gini Jakarta berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang lebar antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. DKI Jakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran tertinggi, yakni 0,441 pada Maret 2025. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 0,375.[17]

Tingkat kesenjangan berdasarkan data di atas menjadi tanda bahaya akan semakin lebarnya jurang ketimpangan itu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa ketimpangan terjadi karena pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat kaya melaju lebih cepat

[15] "Kajian Fiskal Regional DKI Jakarta Tahun 2024," Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terakhir dimodifikasi 12 Maret 2025, https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-kajian-fiskal-regional-dki-jakarta-tahun-2024.html.

[16] Biantga Ali, Feby Delva Primayani, dan Mutiara Rizkia Putri, "Problematika Ketimpangan Sosial di Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan yang Solutif," *Legal System Journal* 2, no. 1 (2025): 16, https://doi.org/10.70656/lsj.v2i1.350.

[17] "Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375," Badan Pusat Statistik, terakhir dimodifikasi 25 Juli 2025, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html.

dibandingkan kelompok lainnya.[18] Dengan kata lain, pihak yang kaya akan semakin berkelimpahan, sementara kelompok menengah ke bawah tertinggal jauh di belakang. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk yang miskin juga tidak terlalu tinggi. Kepala rumah tangga dari pihak ini cenderung bekerja di sektor-sektor informal dengan pendapatan yang relatif kecil.[19] Padahal, ia harus menanggung anggota keluarganya di tengah biaya yang semakin mahal di Jakarta.

Kontras antara Kawasan Elit dan Kawasan Miskin

Tidak ada gambaran yang lebih memprihatinkan selain pemandangan fisik kota Jakarta itu sendiri. Gedung-gedung tinggi yang menjulang sebagai simbol kemajuan dan kekayaan berdiri kontras dengan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai penjuru kota. Kesenjangan ini tercermin dari perbedaan antara perumahan-perumahan mewah di pusat kota dengan kehidupan di permukiman kumuh seperti Ciliwung dan Marunda. Sebagian besar penduduk kedua daerah tersebut masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti perumahan layak, akses air bersih, dan sanitasi yang memadai. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah tetangganya, yaitu Pantai Indah Kapuk (PIK). PIK terkenal dengan segala macam keindahan dan kemegahan bangunan serta fasilitasnya. Bahkan, meskipun pembangunan PIK 2 bertujuan menciptakan suatu kota yang modern dan ramah lingkungan, proyek tersebut juga membawa berbagai dampak buruk bagi wilayah sekitarnya.[20]

Fenomena ini mencerminkan salah satu bentuk nyata dari kesenjangan sosial yang ada di wilayah perkotaan. Dari data yang tersedia, hingga tahun 2020, tercatat sekitar 29,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh perkotaan, menetap di lingkungan padat, serta minim akses terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.[21] Di

[18] Winda Nelfira, "Ketimpangan Meningkat di Jakarta, Pramono Anung: Orang Kaya Makin Kaya", *Liputan 6*, 30 Juli 2025, https://www.liputan6.com/news/read/6119637/ketimpangan-meningkat-di-jakarta-pramono-anung-orang-kaya-makin-kaya.

[19] Putri Anisa Yuliani, "Ketimpangan Sosial di Jakarta Dinilai Masih Tinggi," *Medcom*, 18 Juli 2023, https://www.medcom.id/nasional/metro/GKdE8rdN-ketimpangan-sosial-di-jakarta-dinilai-masih-tinggi.

[20] Nurul Shabrina, "The Development of Pantai Indah Kapuk 2: Social Inequality and Eviction of Salembaran Jati Residents," *Cities and Urban Development Journal* 3, no. 1 (2025), 12, https://doi.org/10.7454/cudj.v3i1.1041.

[21] Editor, "1 Kota 2 Dunia: Permukiman Kumuh di Perkotaan," *Perkim id,* 4 September 2025, https://perkim.id/en/kumuh/1-kota-2-dunia-permukiman-kumuh-di-perkotaan/.

Jakarta, ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik. Ia sudah menjadi suatu pemandangan nyata yang dapat ditemui di setiap sudut Jakarta.

Dampak Sosial dari Ketimpangan

Ketimpangan yang berkelanjutan tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata. Ia memengaruhi seluruh sendi kehidupan sosial. Kesenjangan sosial-ekonomi yang kian melebar di antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin semakin memperburuk situasi keamanan. Ketimpangan ini sering kali menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kejahatan, karena individu-individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap peluang ekonomi cenderung lebih mudah untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal. Dari data BPS, tindak kejahatan di DKI Jakarta per tahun 2023 naik 69,63% dari tahun 2022.[22] Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang perlu dicermati antara kepadatan penduduk, ketimpangan, dan kriminalitas. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial serta peningkatan kualitas layanan publik yang dapat meringankan beban masyarakat miskin.[23]

Pembangunan yang tidak merata di Jakarta tidak hanya memperdalam kesenjangan sosial, tetapi juga menimbulkan masalah-masalah baru, seperti segregasi sosial dan isolasi.[24] Kesenjangan ini membuat mereka yang miskin dan marginal tidak memiliki suara untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan mereka yang sudah berada di puncak tingkat kedudukan sosial dan ekonomi.

---

[22] "Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2023," Badan Pusat Statistik, terakhir dimodifikasi 30 September 2024, https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/45a0b7f6a6430b037f9f8817/crime-statistics-of-dki-jakarta-province-2023.html.

[23] Graciovyn Christiano Tupan, dkk, "Jakarta: Kota Megah dengan Jurang Kesenjangan Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 8, no. 2 (2025): 89, https://doi.org/10.56071/jemes.v8i2.1312.

[24] Nopriyanto Hady Suhanda dan Viddy Firmandiaz, "*Addressing Inequality and Urban Segregation in Jakarta*," *The Jakarta Post,* 17 Juni 2023, https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/17/addressing-inequality-and-urban-segregation-in-jakarta.html.

Urgensi Penanganan Ketimpangan Sosial

Dampak sosial dari ketimpangan ini jelas dan menusuk. Pada September 2025, persentase penduduk miskin Jakarta turun menjadi 4,03% (sekitar 439.120 orang).[25] Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,549 menjadi 0,574, dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,106 menjadi 0,111.[26] Maknanya, mereka yang miskin semakin terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang tak kunjung usai.

Realitas di atas menegaskan bahwa ketimpangan sosial di Jakarta bukan sekadar isu statistik, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang mendesak untuk diatasi. Berdasarkan kenyataan ini, penting untuk mempertanyakan legitimasi pembangunan kota itu sendiri tertuju kepada siapa. Diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan yang inklusif, pemerataan akses terhadap layanan publik, dan pemberdayaan komunitas berbasis keadilan struktural agar Jakarta tidak hanya menjadi kota global dalam angka, tetapi juga dalam kualitas hidup seluruh warganya. Namun, menanggapi ketimpangan sosial tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan publik. Diperlukan nilai-nilai yang lebih mendalam dan terbatinkan. Di sinilah ASG menawarkan pandangannya yang melampaui kepentingan ekonomi semata.

KETIMPANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA

Ketimpangan sosial bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi manifestasi dari krisis fundamental dalam pelaksanaan nilai-nilai Kristiani. Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* menekankan bahwa kesamaan martabat pribadi menuntut dicapainya kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil.[27] Ketika sebagian kecil masyarakat menguasai mayoritas kekayaan sementara jutaan orang hidup dalam kemiskinan, hal ini menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap tiga prinsip fundamental ASG, yaitu martabat manusia, kebaikan bersama, dan solidaritas.

---

[25] "Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta September 2025," Badan Pusat Statistik, terakhir dimodifikasi 5 Februari 2026, https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1257/profil-kemiskinan-provinsi-dki-jakarta-september-2025.html.

[26] Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, "Bantalan Sosial Untuk Meredam Ketimpangan di Jakarta," *Kompas.id*, 31 Juli 2025, https://www.kompas.id/artikel/bantalan-sosial-untuk-meredam-ketimpangan-di-jakarta.

[27] *Gaudium et Spes*, art. 29.

Perjalanan panjang Gereja dalam mengembangkan ajaran sosial dimulai dari Paus Leo XIII dengan *Rerum Novarum* (1891), suatu respons terhadap penderitaan kaum buruh industrial. Tiga puluh tahun kemudian, Paus Yohanes XXIII melalui *Mater et Magistra* (1961) memperbarui ajaran ini dalam konteks kemajuan teknologi dan transformasi global. Seratus tahun setelah *Rerum Novarum*, Paus Yohanes Paulus II melalui *Centesimus Annus* (1991) mengembangkan warisan ini dalam konteks global yang berubah. Paus Benediktus XVI melanjutkan tradisi ini dengan *Caritas in Veritate* (2009), yang mendalami kaitan antara cinta, kebenaran, dan pengembangan manusia integral. Bagian ini mengeksplorasi bagaimana tiga prinsip utama ASG memberikan kerangka teologis untuk memahami dan merespons ketimpangan sosial sebagai tantangan moral bagi Gereja masa kini. Ketiga hal tersebut adalah martabat manusia, kebaikan bersama, dan solidaritas.

Martabat Manusia sebagai Citra Allah

Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:27). Paus Yohanes XXIII dalam *Mater et Magistra* menekankan dengan jelas bahwa manusia sebagai pribadi merupakan dasar, sebab, dan tujuan yang utama bagi setiap lembaga sosial.[28] Dalam era modernisasi, teknologi dan sistem ekonomi tidak boleh merendahkan martabat manusia, melainkan harus melayani pengembangan manusia secara integral. Tingkat perkembangan ekonomi harus diukur tidak hanya dari kuantitas produksi, tetapi dari seberapa jauh sistem itu melayani martabat dan kesejahteraan integral setiap orang.[29]

Martabat ini bersifat intrinsik, tidak bergantung pada prestasi, kekayaan, atau status sosial. Setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat dikurangi bersumber dari hubungan mereka dengan Allah. *Mater et Magistra* mengingatkan bahwa sistem sosial-ekonomi yang menghasilkan ketimpangan ekstrem merupakan pengingkaran terhadap rencana Allah untuk kemanusiaan.[30] Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara integral dalam aspek spiritual, intelektual, dan fisik. Mereka pun tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi

[28] *Mater et Magistra*, art. 219.
[29] *Mater et Magistra*, art. 34.
[30] *Mater et Magistra*, art. 74.

kehidupan mereka maupun menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Paus Yohanes Paulus II dalam *Centesimus Annus* melihat kembali bahwa struktur-struktur dosa tetap hadir dalam masyarakat global. Hal ini mengakibatkan jutaan orang terpuruk dalam kemiskinan dan ketergantungan.[31] *Caritas in Veritate* memperdalam pemahaman ini dengan menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga deprivasi relasional, yaitu ketika orang diputus dari jaringan sosial, hak untuk berpartisipasi, dan akses terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.[32] Tanpa komitmen terhadap martabat manusia, ketimpangan akan terus memperpanjang kesengsaraan dan keterasingan. Jika martabat manusia adalah fondasi, kebaikan bersama adalah tujuan yang harus dicapai oleh seluruh tatanan masyarakat.

Kebaikan Bersama sebagai Tujuan Masyarakat

Kebaikan bersama (*bonum commune*) merupakan tujuan fundamental setiap komunitas. Dalam tradisi Gereja, kebaikan bersama dipahami sebagai situasi di mana setiap anggota masyarakat dapat berkembang secara integral, baik dimensi material maupun spiritual. *Rerum Novarum* mengajarkan bahwa kesejahteraan umum adalah tujuan yang harus ditujukan oleh semua usaha, baik publik maupun privat.[33] Tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses pada kebutuhan dasar dan kesempatan untuk berkembang. *Mater et Magistra* memberikan pengembangan penting tentang kebaikan bersama dalam konteks modernisasi. Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa kebaikan bersama tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas semata, melainkan memerlukan perencanaan sosial yang bijaksana dan intervensi negara yang tepat.[34] Perkembangan ekonomi harus didampingi oleh perkembangan sosial, budaya, dan spiritual, sehingga semua manusia dapat berkembang. Hal ini adalah konsep perkembangan integral yang kemudian dikembangkan oleh Paus Paulus VI melalui *Populorum*

[31] Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus* (1 Mei 1991), art. 37 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999). Dokumen ini selanjutnya disingkat *CA*.

[32] Benediktus XVI, *Caritas in Veritate* (29 Juni 2009), art. 75 (penerj. B. R. Agung Prihartana: Dokpen KWI, 2014).

[33] Leo XIII, *Rerum Novarum* (15 Mei 1891), art. 23 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999). Dokumen ini selanjutnya disingkat *RN*.

[34] *Mater et Magistra*, art. 61.

Progressio (1967). Dalam dokumen tersebut, Paus menegaskan bahwa pembangunan adalah jalan menuju perdamaian sejati.[35]

Ketimpangan sosial menunjukkan bahwa tujuan bersama tidak berjalan. Saat kekayaan hanya terkumpul pada sebagian kecil orang sementara banyak orang lain menderita, sistem sosial-ekonomi jelas tidak bekerja untuk kepentingan semua. Ketidakadilan struktural menciptakan jaringan dominasi, penindasan, dan penyalahgunaan yang membatasi kebebasan dan membuat mayoritas orang sulit membangun dunia yang lebih adil.[36]

Dalam perspektif ASG, kebaikan bersama mencakup empat aspek. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali. *Rerum Novarum* menyatakan bahwa upah pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka.[37] *Mater et Magistra* memperkuat bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak.[38] Kedua adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu akses pada pekerjaan bermartabat dan peluang usaha adil. *Mater et Magistra* mengajarkan bahwa kemajuan teknologi harus memberdayakan pekerja, bukan menggantikan mereka tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.[39] Ketiga adalah partisipasi aktif, yaitu kesempatan bersuara dalam pengambilan keputusan bersama yang memengaruhi kehidupan mereka.[40] Keempat adalah transformasi struktural, yaitu perubahan fundamental dalam cara produksi, distribusi, dan akses terhadap sumber daya yang terorganisir.[41] Namun, kebaikan bersama tidak akan terwujud tanpa prinsip ketiga yang mengikat semuanya, yakni solidaritas.

Solidaritas sebagai Ungkapan Kasih Universal

Solidaritas mengekspresikan kesatuan menyeluruh antara semua anggota masyarakat dan menjadi perwujudan nyata dari kasih Allah

[35] Paulus VI, *Populorum Progressio* (26 Maret 1967), art. 14 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999).

[36] David Hollenbach, "Modern Catholic Teachings Concerning Justice," dalam *The Faith That Does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change*, diedit oleh John C. Haughey (New York: Paulist Press, 1977), 223.

[37] *Rerum Novarum*, art. 34.

[38] *Mater et Magistra*, art. 71.

[39] *Mater et Magistra*, art. 82-83.

[40] *Mater et Magistra*, art. 97.

[41] *Centesimus Annus*, art. 43.

(*agape*). Dalam konteks ketimpangan sosial, solidaritas merupakan panggilan setiap orang untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dalam mengembangkan hidup bersama yang manusiawi.[42] *Rerum Novarum* mengajarkan bahwa kerja sama sejati akan mungkin ketika bagian-bagian masyarakat yang beragam merasakan diri mereka sebagai anggota satu keluarga besar dan anak-anak Allah.[43] *Mater et Magistra* memperkuat bahwa solidaritas adalah ekspresi dari hukum kasih Kristiani yang mengikat semua manusia sebagai saudara dalam satu keluarga besar di bawah Allah yang satu.[44]

Ekspresi penting dari solidaritas adalah *preferential option for the poor* (perhatian lebih kepada kaum miskin). Ini bukan mengasingkan yang kaya, melainkan Gereja memprioritaskan perhatian pada mereka yang paling rentan dan tertindas. Pilihan ini berakar pada Injil dan teladan Yesus yang menunjukkan solidaritas khusus dengan kaum miskin, sakit, dan tersingkir.[45] Dalam Lukas 4:18, Yesus mengatakan, "Roh Tuhan ada atas-Ku, karena Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Konsep *preferential option for the poor* ini dikembangkan lebih lanjut oleh teologi pembebasan Amerika Latin pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang menekankan bahwa pilihannya bukan terhadap kemiskinan itu sendiri, tetapi terhadap orang-orang miskin sebagai subjek transformasi sosial.[46] Opsi ini bukan sekadar amal, melainkan solidaritas aktif dalam perjuangan untuk keadilan struktural.

Solidaritas dioperasionalkan dalam tiga dimensi yang saling melengkapi. Pertama adalah dimensi afektif, yaitu kepekaan terhadap penderitaan mereka yang tertindas, belas kasih, dan keberanian profetik. *Mater et Magistra* mengingatkan bahwa emosi simpati harus diubah menjadi komitmen nyata untuk mengubah struktur yang tidak adil.[47] Ini bukan sekadar sentimentalisme, tetapi gerakan transformatif yang berakar pada kasih yang mendalam. Kedua adalah dimensi praktis, yaitu solidaritas harus mengambil bentuk dalam tindakan-tindakan nyata, dan orang-orang miskin harus menempati prioritas dalam praktik pastoral

[42] Yohanes Yayan Riawan, "Refleksi Teologis Solidaritas menurut Mgr. Johannes Pujasumarta dalam Terang Ajaran Sosial Gereja," *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 10, no. 1 (2021): 17, https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2624.

[43] *Rerum Novarum*, art. 36.

[44] *Mater et Magistra*, art. 164-170.

[45] Boff dan Pixley, *The Bible, The Church, and The Poor*, 109.

[46] Boff dan Pixley, *The Bible, The Church, and The Poor*, 120.

[47] *Mater et Magistra*, art. 219.

Gereja. *Mater et Magistra* mengajarkan bahwa Gereja harus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas.[48] Ketiga adalah dimensi struktural, yaitu solidaritas sejati memerlukan tindakan politis untuk mengubah struktur-struktur sosial menuju masyarakat yang lebih adil, bukan sekadar bantuan amal individual.[49]

REFLEKSI PASTORAL KARDINAL IGNATIUS SUHARYO

Kardinal Ignatius Suharyo adalah Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) yang melayani Gereja partikular ini sejak tahun 2010. Motto tahbisan episkopatnya diambil dari Kisah Para Rasul (20:19) yang berbunyi *"Serviens Domino cum Omni Humilitate"* (Aku Melayani Tuhan dengan Segala Kerendahan Hati). Motto ini dihayatinya sejak ditahbiskan menjadi Uskup Agung Semarang hingga melayani sebagai Uskup Agung Jakarta. Sebagai motto, teks ini tidak sekadar kata-kata indah, tetapi sungguh sebuah usaha manusiawi sekaligus gaya kepemimpinan Kardinal Suharyo. Sejak menjadi Uskup Agung Semarang, Kardinal Suharyo menolak gaya kepemimpinan otokratik, tetapi lebih memilih gaya kepemimpinan-pelayanan yang rendah hati.[50] Keutamaan ini juga tampak dalam pelayanannya sebagai Uskup KAJ.

Sejak pelayanannya di KAJ, Kardinal Suharyo menyuarakan perhatian dan kepeduliannya pada realitas Indonesia, pada umumnya, dan Jakarta, pada khususnya terkait dengan masalah ketimpangan sosial. Beliau aktif menyuarakan permasalahan ini dalam berbagai kesempatan, khususnya melalui konferensi pers dan Surat Gembala yang dibuatnya. Sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya pada masalah ini, ketimpangan sosial menjadi fenomena yang disorotnya ketika menulis Surat Gembala Prapaskah tahun 2025 kepada seluruh umat KAJ. Kardinal Suharyo memperhatikan data Badan Statistik Nasional bahwa angka kemiskinan di Jakarta, Jawa Barat, Tangerang, dan Bekasi – yang masuk dalam wilayah pelayanan KAJ – memang mengalami penurunan. Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak sejalan dengan angka ketimpangan sosial yang

[48] *Mater et Magistra*, art. 160.

[49] *Centesimus Annus*, art. 41.

[50] Yohanes Gunawan, "Kepemimpinan Mgr. I. Suharyo di Keuskupan Agung Semarang Periode 1997-2009 dalam Terang Kepemimpinan Anthony D'Souza," *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 2, no. 2 (2021): 180-181, https://doi.org/10.24071/jt.v2i2.443.

terus meningkat.[51] Maka dari itu, pertobatan umat beriman tidak hanya berhenti pada relasi vertikalnya dengan Yang Ilahi, tetapi juga dengan memperhatikan yang insani, citra Sang Ilahi itu sendiri. Dengan memperhatikan mereka yang lemah dan tersingkir, di situlah cinta kepada Allah juga dibuktikan (Mat. 25:35-40).

Beberapa pokok kata kunci yang menjadi refleksi pastoral Kardinal Suharyo terkait permasalahan ketimpangan sosial di antaranya, belarasa, martabat manusia, kesejahteraan bersama, dan berbagi. Pokok-pokok kunci refleksi Kardinal Suharyo tersebut sebagian besar diambil dari Surat Gembala yang diberikannya pada saat pembukaan Arah Dasar maupun menjelang masa prapaskah. Berikut ini akan dijabarkan beberapa pokok refleksi pastoral Kardinal Suharyo dalam menanggapi masalah-masalah kemanusiaan, termasuk ketimpangan sosial.

Belarasa sebagai Solidaritas Kristiani

Belarasa berasal dari kata Latin, yakni *cum* (bersama-sama) dan *pati* (menderita). Belarasa berarti menderita bersama dengan saudara-saudari yang sedang mengalami penderitaan. Paham umat Katolik mengenai belarasa tentu berasal dari iman akan Allah sendiri yang hadir dalam diri Putra-Nya, Yesus Kristus. Sepanjang hidup-Nya, Yesus memperlihatkan secara jelas wajah Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya ditunjukkan kepada semua orang, terlebih kepada mereka yang lemah, miskin, dan disingkirkan oleh masyarakat.[52] Maka dari itu, usaha untuk memperhatikan mereka yang "kurang beruntung" dalam garis asimetris ketimpangan sosial mesti digerakkan oleh inspirasi akan Allah yang penuh belas kasih itu, bukan sekadar motivasi kemanusiaan.[53] Motivasi kemanusiaan memang perlu untuk mendorong banyak orang melakukan tindakan belarasa. Namun, iman Kristen tidak berhenti hanya sampai di situ. Iman Kristiani mengajarkan bahwa setiap orang dipanggil untuk berbuat kasih (belarasa) bukan karena dirinya adalah pribadi yang

[51] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2025: Kepedulian Lebih kepada Saudara yang Lemah dan Miskin*, 1-2 Maret 2025. Perbedaan data yang digunakan oleh Kardinal Suharyo dengan data yang digunakan dalam penelitian ini kemungkinan berkaitan dengan perbedaan periode pengukuran atau cakupan wilayah yang dirujuk.

[52] Ignatius Suharyo, *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 159-60.

[53] Luce TV, "Belarasa menurut Kardinal Suharyo," dalam Konferensi Pers Gerakan Belarasa LDD KAJ: Menyalakan Harapan, Menghidupkan Kemanusiaan, 21 April 2025, video, 10:25, https://www.youtube.com/watch?v=MpajOgkbH_Y&t=18s.

beruntung atau sudah berkecukupan, tetapi pertama-tama dan utama karena ia telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kasih Allah yang telah dirasakannya menjadi pendorong utama untuk melaksanakan karya-karya belarasa.

Bagi Kardinal Suharyo, iman yang sejati adalah iman yang berbuah pada persaudaraan; persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan yang berbuah pada sikap belarasa. Iman, persaudaraan, dan belarasa adalah dasar untuk membarui kehidupan.[54] Tanpa sikap belarasa yang didasari pada iman dan persaudaraan, seluruh kehidupan di muka bumi akan berjalan secara stagnan. Setiap orang hanya menjadi peduli dengan dirinya sendiri dan menutup diri akan pentingnya memperhatikan kesejahteraan orang lain. Maka dari itu, bila seseorang sungguh beriman, iman ini akan dibuktikan dengan persaudaraan yang berbuah pada tindakan belarasa terhadap semua orang, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Menurutnya, belarasa yang berfokus pada pemberdayaan seseorang akan membawa dampak yang paling signifikan. Belarasa yang sejati tentu mensyaratkan pengakuan atas siapa yang dibela. Pribadi yang dibela bukan objek belas kasih, melainkan manusia dengan martabatnya yang begitu luhur di hadapan Allah.

Martabat Manusia dan Penghormatan terhadap Sesama

Dalam iman Kristiani, manusia disebut sebagai makhluk yang bermartabat karena ia diciptakan secitra dengan Allah sendiri (Kej. 1:27).[55] Martabat manusia tidak ditentukan berdasarkan prestasi, kekayaan, status sosial, maupun jabatan. Manusia bernilai pada dirinya sendiri bukan karena aspek ekstrinsik dalam kehidupan, melainkan nilai intrinsiknya yang terdalam, yakni segambar dengan Allah sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah: bagaimana mengaplikasikan hidup yang secitra dengan Allah itu?

Yesus Kristus adalah Allah dan Manusia sejati. Sebagai Allah dan Manusia sejati, Ia menjadi model bagi umat beriman dalam bersikap dan bertindak terhadap sesamanya. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang "berjalan berkeliling sambil berbuat baik" (10:38). Dengan bercermin pada diri Yesus, Kardinal Suharyo merefleksikan bahwa "manusia yang bermartabat adalah manusia yang

[54] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2013: Makin Beriman, Makin Bersaudara, Makin Berbelarasa*, 9-10 Februari 2013.

[55] *Katekismus Gereja Katolik*, art. 1700.

rajin berbuat baik."[56] Sebagai citra Allah, orang Kristen perlu belajar dari Kristus sendiri apa arti menjadi makhluk yang bermartabat. Martabat manusia dijalankan dengan menghormati sesamanya, terlebih mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan. Mereka yang berada dalam posisi rendah dalam garis asimetris ketimpangan sosial adalah contoh orang-orang yang kurang beruntung. Sebagai citra Allah, manusia yang bermartabat, orang Kristen dipanggil untuk berbuat baik terhadap mereka. Langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan akan sangat berarti bagi mereka yang paling membutuhkan. Maka dari itu, langkah pertama yang sederhana sangat penting untuk dimulai karena akan mendorong untuk langkah-langkah yang lebih besar lagi. Perbuatan baik bukan sekadar aksi positif yang berdampak pada masyarakat, tetapi ia juga menjadi bentuk kesaksian hidup Kristiani yang konkret.[57] Iman mesti diterapkan dalam perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati (Yak. 2:17). Perbuatan yang dimaksud bukan sekadar aksi individual semata. Ia harus mencapai suatu tujuan yang lebih luas, yakni kesejahteraan bersama untuk semua orang tanpa pengecualian.

Kesejahteraan Bersama sebagai Wujud Keselamatan Konkret

Kesejahteraan bersama *(bonum commune)* adalah wujud nyata keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus, Putra-Nya. Keselamatan manusia mencakup tiga aspek, yakni spiritual (rohnya), mental (jiwanya), dan fisik (tubuhnya).[58] Keselamatan tidak hanya menyangkut aspek eskatologis di masa depan, tetapi juga menyangkut masa sekarang. Manusia memang merindukan keselamatan kekal untuk tinggal dalam damai abadi bersama Allah di surga. Namun, ia pun membutuhkan keselamatannya di dunia, yakni berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Maka dari itu, menurut Kardinal Suharyo, kesejahteraan bersama itu perlu dilakukan dalam tindakan yang konkret, kreatif, dan kontekstual.[59]

Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk pemenuhan kebutuhan yang relevan dengan masalah ketimpangan sosial, yakni pemenuhan kebutuhan

[56] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2022: Menjunjung Tinggi Martabat Manusia. Semakin Mengasihi, Semakin Peduli, Semakin Bersaksi*, 26-27 Februari 2022.

[57] Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2022*.

[58] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2023: Peran Serta Kita dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*, 18-19 Februari 2023.

[59] Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2023*.

dasar dan pemberdayaan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan dengan menyediakan makanan bergizi, serta membantu akses terhadap pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan membantu orang lain memperoleh pekerjaan, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan menciptakan lapangan pekerjaan.[60] Dengan langkah-langkah sederhana ini diharapkan kesejahteraan semua orang dapat dipastikan. Kesejahteraan rohani untuk tinggal bersama Allah memang menjadi tujuan utama. Namun, kesejahteraan bersama dalam hidup di dunia juga tidak kalah pentingnya, karena menjadi wujud nyata keselamatan yang telah dilaksanakan oleh Kristus sendiri dalam korban salib-Nya.

Kristus itu "datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani" (Mat. 20:28). Ini pula yang menjadi jati diri murid-murid Kristus. Sebagai pribadi yang telah dipanggil dan dipilih, setiap umat Kristiani diminta untuk belajar dari Kristus untuk datang bukan untuk menerima pelayanan, tetapi justru turun dan melayani banyak orang demi kebaikan bersama.[61] Dengan demikian, kebaikan bersama yang diwujudkan bersumber dari Kristus sendiri yang teladan hidup-Nya menjadi inspirasi dalam kehidupan. Kesejahteraan bersama ini hanya akan terwujud bila ada kerelaan untuk berbagi. Bagi Kardinal Suharyo, kerelaan untuk berbagi berakar pada pengalaman iman yang paling sentral, yakni Ekaristi.

Berbagi sebagai Praktik Kerajaan Allah

Perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Kristiani.[62] Setiap orang yang ambil bagian dalam perayaan tersebut tidak hanya dipersatukan dengan Kristus, tetapi juga dengan Gereja dan seluruh ciptaan.[63] Dalam Perayaan Ekaristi, terdapat empat hal penting yang menuntut perhatian umat, yakni di kala Roti Ekaristi diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan akhirnya dibagi-bagikan. Keempat hal penting itu pula yang diharapkan menjadi identitas dari penerima-Nya, yakni menjadi pribadi ekaristis: pribadi yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan akhirnya dibagikan demi kepentingan banyak orang.[64] Menjadi pribadi

[60] Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2023*.
[61] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2014: Dipilih untuk Melayani*, 1-2 Maret 2014.
[62] *Lumen Gentium* (21 November 1964), art. 11.
[63] Andreas B. Atawolo, *Ekaristi: Sakramen Persekutuan Semesta* (Bekasi: Tollelegi, 2020), xvi.
[64] Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Menyambut Tahun Ekaristi 2012*, 26-27 November 2011.

yang diambil berarti menjadi pribadi yang terpilih karena kasih Tuhan yang berlimpah; pribadi yang diberkati berarti menerima kelimpahan rahmat dari Tuhan yang memintanya untuk membagikan rahmat itu pula kepada banyak orang; pribadi yang dipecah-pecah berarti siap berkorban demi kepentingan sesama; dan menjadi pribadi yang dibagikan-bagikan berarti tidak hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, maupun golongan, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada dalam posisi rendah dalam garis asimetris ketimpangan sosial.

Setiap milik selalu memiliki nilai sosial.[65] Tidak ada harta milik yang selalu bernilai privat pada dirinya sendiri. Selalu ada dimensi di mana harta yang dimiliki oleh seseorang tidak menjadi miliknya sendiri, tetapi perlu dibagikan kepada orang lain. Dalam iman Kristiani, situasi inilah yang mewujudkan hadirnya Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tatanan hidup bersama di mana kehendak Allah terlaksana di bumi sebagaimana di surga (Mat. 6:10). Ketika Kerajaan Allah terlaksana, orang-orang miskin dibebaskan dari penderitaan mereka. Tatanan hidup Kerajaan Allah ini dapat terwujud bila orang rela untuk berbagi milik kepunyaan, tidak memendam hartanya sendiri, dan tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk memeras dan merampas orang lain.[66] Dengan demikian, situasi mereka yang berada dalam posisi rendah dalam ketimpangan sosial dapat diringankan ketika semua orang rela berbagi apa yang dimilikinya. Tindakan berbagi ini memang tidak serta merta menyeimbangkan neraca ketimpangan sosial menjadi seimbang. Namun, kehidupan yang lebih baik membuat orang mudah untuk merasakan bagaimana situasi hadirnya Kerajaan Allah itu. Ini adalah tugas bagi semua orang, terlebih mereka yang mengaku diri dibaptis.

Setelah menelaah ketimpangan sosial di Jakarta berdasarkan statistik dan memaknainya melalui perspektif ASG serta refleksi pastoral Kardinal Suharyo, kini tiba saatnya untuk menyatukan semuanya ke dalam pembacaan teologis yang utuh. Bagaimana ketiga dimensi itu berbicara satu sama lain?

[65] Suharyo, *The Catholic Way*, 178.
[66] Julius Darmaatmadja dan Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2010*, 13-14 Februari 2010.

MEMBACA KETIMPANGAN SOSIAL JAKARTA SECARA TEOLOGIS

Jakarta merupakan representasi nyata dari paradoks pembangunan yang menghadirkan kesenjangan tajam antara kemewahan dan kemiskinan dalam satu kota. Dalam kerangka teologis Gereja Katolik, realitas ini bukan sekadar persoalan sosial-ekonomi, melainkan juga persoalan iman yang menuntut tanggapan profetis. Melalui ASG, Gereja Katolik menegaskan bahwa ketimpangan sosial yang mengakibatkan tumbuhnya kemiskinan di mana-mana merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia sebagai *imago Dei*. Gereja dipanggil untuk menjadi "Gereja kaum miskin", bukan hanya hadir di tengah kemiskinan, melainkan membangun dialog nyata bersama kaum tertinggal demi mewujudkan keadilan yang transformatif dalam konteks kemiskinan di Indonesia.[67]

Jutaan warga Jakarta yang tinggal di daerah marginal mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri secara integral, seperti spiritual, intelektual, dan fisik. Mereka tidak memiliki akses pendidikan layak, kesehatan, dan pekerjaan bermartabat. Paus Leo XIII dalam *Rerum Novarum* mengajarkan bahwa upah harus mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Namun, realitas Jakarta menunjukkan sebaliknya, seperti buruh sektor informal yang bekerja dua belas jam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paus Yohanes XXIII dalam *Mater et Magistra* mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus didampingi perkembangan sosial dan spiritual untuk semua orang. Namun, Jakarta menghadirkan paradoks. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kesenjangan meningkat. Sistem yang ada hanya melayani segelitir orang saja.

Sistem seperti ini bertentangan dengan konsep kebaikan bersama (*bonum commune*). Sistem seharusnya dibuat supaya menyejahterakan semua orang dan tidak ada yang dirugikan. Namun, pihak yang berkuasa mengaturnya sedemikian rupa hanya demi menyejahterakan kelompok mereka. Misalnya, berbagai kebijakan dan undang-undang dibuat untuk menguntungkan mereka yang memiliki kuasa. Maka dari itu, ketimpangan sosial bukan semata-mata kesalahan dari pribadi yang terkena dampak dari permasalahan ini. Permasalahan ini terjadi karena pihak yang berkuasa tidak melayani masyarakat demi kesejahteraan bersama, melainkan melayani diri mereka sendiri serta kelompoknya. Hal ini

[67] Dismas Kwirinus dan Heribertus Peri, "Menjadi Gereja Kaum Miskin: Suatu Refleksi Teologi dan Dialog antara Gereja dan Kaum Miskin dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia," *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 7, no. 2 (2023): 69-70, https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.159.

disebut sebagai dosa struktural. Dosa ini mengorbankan kesejahteraan banyak orang.[68] Maka dari itu, bukan hanya pihak yang berada dalam strata rendah yang perlu memperbaiki diri, melainkan seluruh sistem yang ada perlu direvisi. Gereja pun tidak cukup hanya memberi bantuan secara karitatif. Ia perlu menyerukan suara moralnya demi perubahan sistem yang menyejahterakan semua orang.

John Haughey dalam *The Faith That Does Justice* menekankan bahwa umat Kristiani tidak akan berubah sikap tentang keadilan sampai mereka melihat Yesus mewujudkan cita-cita keadilan yang Gereja ajarkan.[69] Ini berarti Gereja harus membaca penderitaan Jakarta sebagai panggilan konkret Tuhan. Solidaritas Kristiani bukan sekadar belas kasih, melainkan komitmen aktif untuk membela mereka yang tersingkir oleh struktur yang tidak adil. Gereja KAJ diundang menjadi advokat profetik yang tidak hanya berdoa atas penderitaan, tetapi mengambil tindakan nyata, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta kritik terhadap struktur yang eksploitatif. Ketimpangan Jakarta adalah panggilan Tuhan kepada umat beriman untuk mewujudkan Kerajaan Allah yang mencakup keadilan sosial.

Refleksi pastoral Kardinal Suharyo terhadap kondisi sosial-kemasyarakatan KAJ memperlihatkan empat hal yang pokok, yaitu belarasa,[70] martabat manusia,[71] kesejahteraan bersama,[72] dan berbagi.[73] Dari hal tersebut, masalah ketimpangan sosial di Jakarta tidak hanya mampu diselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Semua orang, dimulai dari dirinya sendiri, harus memiliki perhatian terhadap sesamanya demi kebaikan umum. Bila warga Jakarta hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, perubahan yang signifikan dan bertahan lama akan sulit untuk dicapai. Namun, bila kualitas kepribadian seseorang diubah secara sungguh dari dalam, hal ini tentu akan membawa kontribusi yang besar demi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Gereja perlu untuk bekerja sama dengan pemimpin agama dan kepercayaan lain agar melalui

---

68 Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* (30 Desember 1987), art. 36 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999). Dokumen ini selanjutnya disingkat *SRS*.

69 Haughey, "Jesus as the Justice of God," 274.

70 Luce TV, "Belarasa menurut Kardinal Suharyo"; Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2013*; Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2025*.

71 Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2022*.

72 Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2014*; Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2023*.

73 Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2010*; Suharyo, *Surat Gembala Menyambut Tahun Ekaristi 2012*.

khotbah dan pengajarannya, setiap pihak turut serta membangun kualitas masyarakat yang integral, yaitu utuh secara intelektual, emosional, fisik, spiritual, moral, dan sosial.

Dari refleksi pastoral Kardinal Suharyo terlihat bahwa masalah ketimpangan sosial yang ada di Jakarta bukan hanya terkait masalah ekonomi, melainkan juga masalah moral dan sosial yang menuntut respons iman yang konkret. Dimensi moral dan sosial seseorang memengaruhi cara berpikir dan bertindak terhadap sesamanya. Bila seseorang memiliki kualitas moral dan sosial yang baik, tentu akan berdampak terhadap tindakannya. Tindakan yang paling tampak adalah solidaritasnya terhadap sesama, sebab solidaritas merupakan keutamaan moral dan sosial seseorang. Ia pun merupakan kebutuhan eksistensial dan mendasar manusia. Solidaritas adalah sikap untuk mengutamakan orang miskin demi terwujudnya kesejahteraan bersama *(bonum commune)*.[74] Maka dari itu, Gereja KAJ diajak untuk menjadi komunitas kontras (alternatif)[75] yang bersolider secara nyata.

Solidaritas yang nyata ini mencerminkan bahwa Gereja KAJ tidak menutup mata pada realitas ketimpangan sosial yang ada di Jakarta. Gereja KAJ tetap berpijak pada preferensi utama Gereja Universal, yaitu keberpihakan kepada mereka yang miskin *(preferential option for the poor)*.[76] Seperti Kristus yang berbelas kasih pada mereka yang dipandang sebelah mata, Gereja pun berusaha untuk memiliki perhatian terhadap mereka yang tersingkirkan. Refleksi ini menjadi aktualisasi teologi sosial Gereja Katolik yang kontekstual dalam lingkup KAJ. Dengan ini, teologi sosial tidak berhenti hanya pada konsep yang abstrak dan universal, melainkan diterjemahkan menjadi dasar praksis pastoral Gereja KAJ yang konkret.

Sesuai refleksi dari Kardinal Suharyo, Gereja KAJ perlu menjadi komunitas kontras yang menghayati serta menghidupi nilai-nilai yang berbeda dari arus dunia. Bila dunia mengatakan bahwa hak milik hanya bersifat privat, Gereja menyatakan sebaliknya. Hak milik selalu memiliki

---

74 Riawan, "Refleksi Teologis Solidaritas," 16-17.

75 Komunitas kontras adalah paguyuban yang menghayati dan menghidupi nilai-nilai Injili yang berbeda dengan nilai-nilai yang diyakini oleh dunia (Ignatius Suharyo, *Surat Gembala Prapaskah 2020: Menjadi Komunitas Alternatif dengan Mewujudkan Keadilan Sosial*, 22-23 Februari 2020).

76 *Sollicitudo Rei Socialis,* art. 42.

dimensi sosialnya.[77] Hal ini merupakan wujud nyata dari identitas Kristiani, yakni sebagai garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16). Gereja KAJ menghidupi identitas tersebut bukan dengan menjadi penonton terhadap realitas kehidupan, tetapi menjadi suara moral dan prakarsa karitatif serta transformatif untuk meringankan penderitaan umat.

Secara konkret Gereja KAJ mempraktikkan penghayatan ini melalui program-program yang terdapat dalam Komisi PSE KAJ, seperti Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK),[78] Ayo Kerja,[79] Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK),[80] dan Koperasi Simpan Pinjam *(Credit Union)*. Menurut Ketua Komisi PSE KAJ, Pastor Adrianus Suyadi, SJ, program-program ini mengikuti Arah Dasar KAJ di bawah kepemimpinan Kardinal Suharyo, yang berpijak pada prinsip-prinsip ASG, yakni martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, subsidiaritas, dan keberpihakan pada orang miskin. Pelaksanaan semua program tersebut dipercayakan pada paroki-paroki. Komisi PSE KAJ berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator.[81] Melalui kesadaran dan program-program ini, identitas Kristiani sebagai garam dan terang dunia menjadi sebuah penghayatan iman yang dilaksanakan.

Program-program ini juga perlu dicermati secara kritis. Menurut Pastor Suyadi, SABUK sudah ada di sekitar 60% paroki KAJ, Ayo Kerja sekitar 50%, dan *credit union* sudah dimiliki di hampir semua paroki. Semua program ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti bantuan karitatif yang lebih dominan diberikan dibandingkan pemberdayaan, dana Aksi Puasa Pembangunan berupa donasi yang dapat menimbulkan ketergantungan, dan berbagai macam kekhasan paroki yang membuat satu pola tidak dapat dipraktikkan di semua paroki.[82] Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa program Komisi PSE-KAJ berpengaruh besar terhadap rasio gini Jakarta. Penelitian ini membaca

---

77 Suharyo, *The Catholic Way*, 178; lih. Pius XI, *Quadragesimo Anno* (15 Mei 1931), art. 49 (penerj. R. Hardawiryana: Dokpen KWI, 1999).

78 Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK) adalah gerakan solidaritas "dari umat dan untuk umat" di KAJ untuk membantu anak-anak dari keluarga pra-sejahtera agar dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.

79 Ayo Kerja adalah program Komisi PSE KAJ untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja.

80 Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK) adalah program dan komunitas pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdapat di paroki-paroki KAJ.

81 Wawancara dengan Pastor Adrianus Suyadi, SJ (Ketua Komisi PSE-KAJ dan Direktur Lembaga Daya Dharma KAJ) pada 25 Februari 2026.

82 Wawancara dengan Pastor Adrianus Suyadi, SJ.

program-program tersebut sebagai bentuk pemberdayaan dan tanda kenabian Gereja KAJ dalam menyikapi masalah ketimpangan sosial yang ada di Jakarta, meskipun masih dalam jangkauan yang terbatas.

Dengan demikian, dari dialog antara realitas sosial, ASG, dan refleksi pastoral ini, dapat disimpulkan bahwa realitas ketimpangan sosial di Jakarta adalah panggilan bagi setiap umat beriman, khususnya warga KAJ, untuk mewujudkan Kerajaan Allah di tengah Ibu Kota Negara. Dalam iman Kristiani, realitas ketimpangan ini bukan beban yang harus diratapi, melainkan *locus* bagi kasih Allah dinyatakan ke dalam dunia. Dalam konteks ini, refleksi pastoral Kardinal Suharyo menunjukkan bahwa Gereja KAJ bergerak sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah yang mau berpartisipasi secara aktif dan solider di tengah persoalan Jakarta. Dengan ini, ASG diterjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan umat dan masyarakat dalam teritori pelayanan KAJ.

KESIMPULAN

Status Jakarta sebagai ibu kota dan kota megapolitan ternyata menyimpan sejumlah paradoks. Jakarta yang menjadi harapan di mana masyarakat dapat menemukan tempat untuk bekerja dan kehidupan yang lebih baik, ternyata memiliki persoalan yang begitu kompleks dalam hal kesenjangan sosial. Secara umum, kota Jakarta memiliki banyak bangunan yang tinggi menjulang, rumah-rumah mewah di kawasan tertentu, dan tempat-tempat elit lainnya. Namun, di balik keindahan itu, ada sisi-sisi lain masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini tampak dari banyaknya pengemis dan pengamen di sekitar lampu merah dan keluarga-keluarga yang tinggal di kolong jembatan. Ini semua merupakan realitas Jakarta yang membuat kita bertanya bagaimana memperjuangkan martabat kemanusiaan bagi mereka yang terpinggirkan ini.

Ketimpangan sosial adalah pelanggaran terhadap tiga pilar fundamental ASG, yaitu martabat manusia yang diciptakan menurut citra Allah, kebaikan bersama yang menjadi tujuan setiap masyarakat, dan solidaritas yang mengekspresikan kasih universal. *Mater et Magistra* memberikan kontribusi penting dengan mengingatkan bahwa dalam era modernisasi, fokus utama harus tetap pada pengembangan integral manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ensiklik ini mengajarkan bahwa pembangunan sejati harus mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial yang menjangkau semua orang. Warisan dari *Rerum*

Novarum, *Mater et Magistra*, dan *Centesimus Annus* membentuk kontinuitas dalam pengabdian Gereja terhadap keadilan sosial. Ketimpangan sosial adalah dosa struktural yang memerlukan respons pastoral, profetis, dan komprehensif.

Ajaran Sosial Gereja memberikan kerangka teologis kuat untuk memahami dan menanggapi ketimpangan sosial. Dengan menempatkan martabat manusia sebagai fondasi, kebaikan bersama sebagai tujuan, dan solidaritas sebagai cara, Gereja diundang menjadi instrumen perubahan sosial sejati, membawa kabar baik kepada yang miskin dan membebaskan yang tertindas, sesuai misi Kristus sendiri. Jika ASG memberi fondasi universal, refleksi pastoral Kardinal Suharyo menunjukkan bagaimana fondasi itu dapat membumi dalam konteks Jakarta.

Refleksi pastoral Kardinal Suharyo membantu membaca realitas ketimpangan sosial yang terdapat di Jakarta dengan empat pokok utama, yakni belarasa sebagai solidaritas Kristiani, martabat manusia dan penghormatan terhadap sesama, kesejahteraan bersama sebagai wujud keselamatan konkret, dan berbagi sebagai praktik Kerajaan Allah. Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa realitas ketimpangan sosial bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga masalah moral dan sosial yang menuntut tanggapan iman yang konkret. Dengan mendasarkan refleksi terhadap Kitab Suci dan Ajaran Sosial Gereja, Kardinal Suharyo menegaskan bahwa manusia adalah makhluk bermartabat karena diciptakan sebagai citra Allah. Dengan demikian, ketidakadilan struktural dan kemiskinan adalah pelanggaran terhadap martabat ilahi yang ada dalam diri manusia. Refleksi ini juga mengaktualisasikan prinsip *preferential option for the poor* yang dipegang Gereja secara kontekstual dalam lingkup KAJ. Dengan ini, teologi sosial yang abstrak dan universal dapat diterjemahkan menjadi praksis pastoral yang nyata. Akhirnya, Gereja KAJ diajak untuk menjadi komunitas kontras yang bersolider, yakni komunitas yang menjawab ketimpangan sosial dengan membarui diri secara moral, sosial, dan tentu spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Biantga, Feby Delva Primayani, dan Mutiara Rizkia Putri. "Problematika Ketimpangan Sosial di Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan yang Solutif." *Legal System Journal* 2, no. 1 (2025): 13-22. https://doi.org/10.70656/lsj.v2i1.350.

Alkitab Deuterokanonika Terjemahan Baru Edisi Kedua (TB 2). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia - Lembaga Biblika Indonesia, 2023.

Atawolo, Andreas B. *Ekaristi: Sakramen Persekutuan Semesta*. Bekasi: Tollelegi, 2020.

Benediktus XVI. *Caritas in Veritate (Kasih dalam Kebenaran)*. 29 Juni 2009. Diterjemahkan oleh B. R. Agung Prihartana. Jakarta: Dokpen KWI, 2014. AAS 101 (2009).

Boff, Clodovis, dan Jorge Pixley. *The Bible, The Church, and The Poor*. Michigan: Orbis Books, 1989.

Darmaatmadja, Julius dan Ignatius Suharyo. *Surat Gembala Prapaskah 2010*. 13-14 Februari 2010.

Dhany, Fransiskus Wisnu Wardhana, "Bantalan Sosial Untuk Meredam Ketimpangan di Jakarta," *Kompas.id*, 31 Juli 2025, https://www.kompas.id/artikel/bantalan-sosial-untuk-meredam-ketimpangan-di-jakarta.

Editor, "1 Kota 2 Dunia: Permukiman Kumuh di Perkotaan," *Perkim id,* 4 September 2025, https://perkim.id/en/kumuh/1-kota-2-dunia-permukiman-kumuh-di-perkotaan/.

Editor, "Pramono Sebut Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Menurun pada Kuartal I-2026," *Regional Kontan.co.id*, 17 April 2026, https://regional.kontan.co.id/news/pramono-sebut-tingkat-ketimpangan-ekonomi-di-jakarta-menurun-pada-kuartal-i-2026

Fachri, Fairuz Muhammad Sabiq, Muhammad Mikail Harahap, Rifqi Khoiri Mudoffar, Naufal Arifandi Ananda, dan Muhammad Fattan Abyansyah. "Analisis Pengaruh Migrasi terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Jakarta." *Journal Social Society* 5, no 2 (2025): 896-905. https://doi.org/10.30605/jss.5.2.2025.793.

Gunawan, Yohanes. "Kepemimpinan Mgr. I. Suharyo di Keuskupan Agung Semarang Periode 1997-2009 dalam Terang Kepemimpinan Anthony D'Souza." *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 2, no. 2 (2021): 180-181. https://doi.org/10.24071/jt.v2i2.443.

Haughey, John C. "Jesus as the Justice of God." Dalam *The Faith That Does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change*, diedit oleh John C. Haughey, 264-290. New York: Paulist Press, 1977.

Hollenbach, David. "Modern Catholic Teachings Concerning Justice." Dalam *The Faith That Does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change*, diedit oleh John C. Haughey, 207-231. New York: Paulist Press, 1977.

Katekismus Gereja Katolik. Diterjemahkan oleh Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995.

Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes (Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern)*. 7 Desember 1965. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1990. AAS 58 (1966).

Konsili Vatikan II. *Lumen Gentium (Terang Bangsa-bangsa)*. 21 November 1964. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1990. AAS 57 (1965).

Kwirinus, Dismas dan Heribertus Peri, "Menjadi Gereja Kaum Miskin: Suatu Refleksi Teologi dan Dialog antara Gereja dan Kaum Miskin dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia." *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 7, no. 2 (2023): 56-71. https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.159.

Lawrence, Peter. "The Global and National Inequality Faultlines: The Economic Dimensions of (In)Security." *Journal of Global Faultlines* 8, no. 1 (2021): 23-33. https://doi.org/10.13169/jglobfaul.8.1.0023.

Leo XIII. *Rerum Novarum (Hal-hal Baru)*. 15 Mei 1891. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999.

Leo XIV. "Magnifica Humanitas." 15 Mei 2026. https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html.

Lonergan, Bernard. *Method in Theology*. Toronto: University of Toronto Press, 2007.

Milanovic, Branko. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Nelfira, Winda, "Ketimpangan Meningkat di Jakarta, Pramono Anung: Orang Kaya Makin Kaya", *Liputan 6*, 30 Juli 2025, https://www.liputan6.com/news/read/6119637/ketimpangan-meningkat-di-jakarta-pramono-anung-orang-kaya-makin-kaya.

Paulus VI. *Populorum Progressio (Perkembangan Bangsa-bangsa)*. 26 Maret 1967. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999. AAS 59 (1967).

Pius XI. *Quadragesimo Anno (Ke-Empat Puluh Tahun)*. 15 Mei 1931. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999. AAS 23 (1931).

Riawan, Yohanes Yayan. "Refleksi Teologis Solidaritas menurut Mgr. Johannes Pujasumarta dalam Terang Ajaran Sosial Gereja." *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 10, no. 1 (2021): 1-18. https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2624.

Shabrina, Nurul. "The Development of Pantai Indah Kapuk 2: Social Inequality and Eviction of Salembaran Jati Residents." *Cities and Urban Development Journal* 3, no. 1 (2025): 1-15. https://doi.org/10.7454/cudj.v3i1.1041.

Suhanda, Nopriyanto Hady dan Viddy Firmandiaz, *"Addressing Inequality and Urban Segregation in Jakarta," The Jakarta Post,* 17 Juni 2023, https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/17/addressing-inequality-and-urban-segregation-in-jakarta.html.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Menyambut Tahun Ekaristi 2012*. 26-27 November 2011.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2013: Makin Beriman, Makin Bersaudara, Makin Berbelarasa*. 9-10 Februari 2013.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2014: Dipilih untuk Melayani*. 1-2 Maret 2014.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2020: Menjadi Komunitas Alternatif dengan Mewujudkan Keadilan Sosial*. 22-23 Februari 2020.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2022: Menjunjung Tinggi Martabat Manusia. Semakin Mengasihi, Semakin Peduli, Semakin Bersaksi*. 26-27 Februari 2022.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2023: Peran Serta Kita dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*. 18-19 Februari 2023.

Suharyo, Ignatius. *Surat Gembala Prapaskah 2025: Kepedulian Lebih kepada Saudara yang Lemah dan Miskin*. 1-2 Maret 2025.

Suharyo, Ignatius. *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Tupan, Graciovyn Christiano, Wilbert, Maureen Xaviera Sisley, Netta Wijaya, Klarissa, Scherika Tanaka, Kiky Soraya, dan Sukron Ma'Mun. "Jakarta: Kota Megah dengan Jurang Kesenjangan Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 8, no. 2 (2025): 82-90, https://doi.org/10.56071/jemes.v8i2.1312.

Yohanes Paulus II. *Centesimus Annus (Ulang tahun ke-Seratus)*. 1 Mei 1991. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999. AAS 83 (1991).

Yohanes Paulus II. *Sollicitudo Rei Socialis (Keprihatinan Sosial)*. 30 Desember 1987. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999. AAS 80 (1988).

Yohanes XXIII. *Mater et Magistra (Ibu dan Guru)*. 15 Mei 1961. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1999. AAS 53 (1961).

Yuliani, Putri Anisa, "Ketimpangan Sosial di Jakarta Dinilai Masih Tinggi," *Medcom*, 18 Juli 2023,

https://www.medcom.id/nasional/metro/GKdE8rdN-ketimpangan-sosial-di-jakarta-dinilai-masih-tinggi.

Website

Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375." Terakhir dimodifikasi 25 Juli 2025. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html.

Badan Pusat Statistik. "Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025) Provinsi DKI Jakarta." Terakhir dimodifikasi 5 Mei 2026. https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/1339/hasil-survei-penduduk-antar-sensus--supas-2025--provinsi--dki-jakarta.html.

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta September 2025." Terakhir dimodifikasi 5 Februari 2026. https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1257/profil-kemiskinan-provinsi-dki-jakarta-september-2025.html.

Badan Pusat Statistik. "Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2023." Terakhir dimodifikasi 30 September 2024. https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/45a0b7f6a6430b037f9f8817/crime-statistics-of-dki-jakarta-province-2023.html.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. "Kajian Fiskal Regional DKI Jakarta Tahun 2024." Terakhir dimodifikasi 12 Maret 2025. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-kajian-fiskal-regional-dki-jakarta-tahun-2024.html.

Luce TV. "Belarasa menurut Kardinal Suharyo." Dalam *Konferensi Pers Gerakan Belarasa LDD KAJ: Menyalakan Harapan, Menghidupkan Kemanusiaan*. 21 April 2025. Video, 10:25. https://www.youtube.com/watch?v=MpajOgkbH_Y&t=18s.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Pemprov DKI Siapkan Tujuh Kebijakan." Terakhir dimodifikasi 28 Juli 2025. https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/5762-SP-HMS-07-2025.